

LAPORAN KINERJA 2024



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANJARBARU**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Prinsip utama dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik (*good government*) adalah akuntabilitas, hal itu merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggaraan negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pada setiap akhir tahun. Kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan Negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). AKIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun Anggaran 2024 adalah merupakan dokumen pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan dari keseluruhan program dan kegiatan yang terdapat pada perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru Tahun Anggran 2024. Capaian Kinerja pada laporan ini mengacu kepada tolak ukur yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Nomor : 188.45/037/Kesbangpol/2021 yang pengesahannya ditetapkan melalui Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor: 188.45/268/ KUM/2021.

Selama ini pengukuran keberhasilan dan kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara objektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya ditekankan pada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran saja. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah yang sudah ditetapkan, walaupun manfaat serta keluaran dari pelaksanaan program tersebut masih jauh dibawah target yang sudah direncanakan. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktifitas instansi tersebut harus

dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada masukan (*input*) dari program, akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran (*output*), proses, manfaat, dan dampak.

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Selain itu pula Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj) ini juga merupakan salah satu komponen dari rangkaian pertanggungjawaban yang **harus dan wajib** dipenuhi dan dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk akuntabilitas dan evaluasi yang mana isi laporannya lebih berorientasi pada capaian keberhasilan (Outcome) dari pencapaian masing-masing program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran.

Penyusunan Laporan pertanggungjawaban ini bukanlah dokumen laporan yang berdiri sendiri, namun berkorelasi dan tidak terpisahkan dengan dokumen-dokumen perencanaan program dan kegiatan lainnya, yaitu RPJMD Kota Banjarbaru dengan Renstra SKPD 2021-2026, RKPD/Renja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Perjanjian Kinerja serta Rencana Kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.

1.2 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DAN GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Penyusunan Laporan Kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru tahun 2024 ditetapkan dan mengacu pada perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru Juncto Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru.
5. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 tahun 2013 Tentang Tugas Pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.
6. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/268/Kum/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru Nomor 188.45/037/Kesbangpol/2021 tentang Tim Penyusun Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

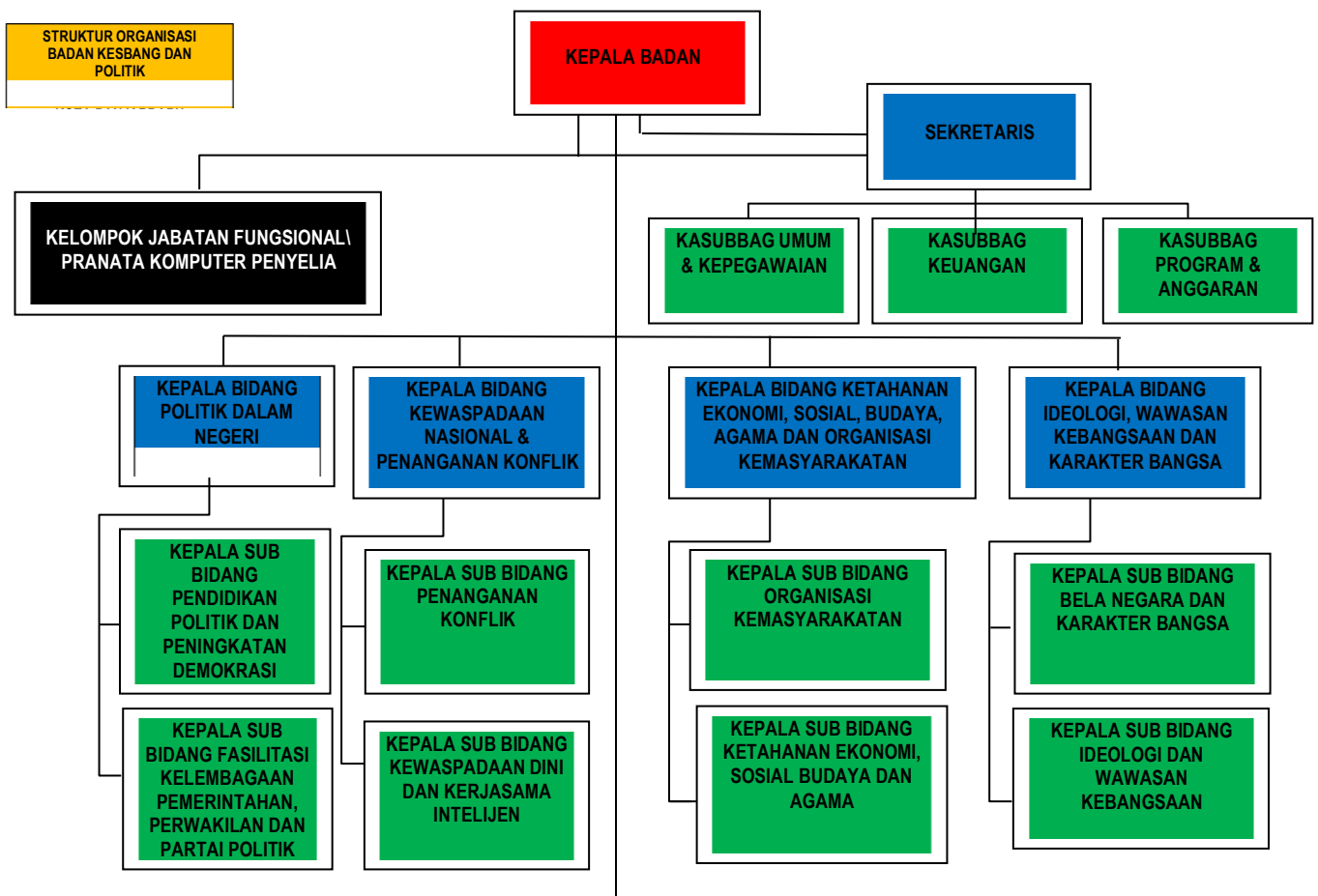
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru dan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 tahun 2013 Tentang tugas pokok , fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru ditegaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru memiliki tugas pokok “ **Membantu Walikota dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa, Politik dan Organisasi Kemasyarakatan Sesuai Peraturan Perundang- undangan** ” yang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang politik, ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- b. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah pada bidang politik, ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
- c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi dibidang politik dalam negeri.
- d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional.
- e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pengendalian di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
- f. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

1.3.2 Struktur Organisasi

Dalam mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru mempunyai struktur organisasi seperti ditunjukkan dalam Gambar berikut :



1.3.3 Keadaan Pegawai

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024, Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru didukung oleh orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru
Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	31
2	Tenaga Kontrak	12
	Jumlah	43 orang

Sumber data diambil dari Aplikasi SIMPEG Kota Banjarbaru

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai ASN Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Status	Jumlah
1	S2	5
2	S1	18
3	D3	2
4	SLTA	6
5	SLTP	0
	Jumlah	31 orang

Sumber data diambil dari Aplikasi SIMPEG Kota Banjarbaru

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Tenaga Kontrak Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

No	Status	Jumlah
1	S2	1
2	S1	6
3	D3	2
4	SLTA	0
5	SLTP	3
	Jumlah	12 orang

Sumber data diambil dari Sub Bagian Umpeg Bakesbangpol Kota Banjarbaru

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai ASN Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru
Berdasarkan Pangkat

No	Status	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	1
2	Pembina Tingkat I	1
3	Pembina	6
4	Penata Tingkat I	15
5	Penata	1
6	Penata Muda Tingkat I	1
7	Penata Muda	3
8	Pengatur Tingkat I	2
9	Pengatur	1
	Jumlah	31 Orang

Sumber data diambil dari Aplikasi SIMPEG Kota Banjarbaru

I.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru mempunyai Tugas Pokok “Menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik” dalam dinamika perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, khususnya sebagai akibat arus globalisasi yang demikian deras, akan mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Banjarbaru. Di samping pengaruh-pengaruh positif, kondisi ini juga membawa pengaruh negatif yang berdampak pada peningkatan potensi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan terhadap ideologi dan semangat kebangsaan serta dalam menciptakan kondusivitas daerah; dan tingginya intensitas gangguan kamtibmas. Potensi tersebut antara lain dalam bentuk degradasi semangat kebangsaan dan bela negara, peningkatan konflik sosial, dan maraknya faham serta kelompok radikal.

Kondisi-kondisi ini dapat berpotensi mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan serta cinta tanah air, dan

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait dan melalui peran serta semua elemen masyarakat. Dinamika perkembangan demokrasi di Indonesia juga cukup pesat yang ditunjukkan antara lain dengan diterapkannya sistem multi partai dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Perkembangan ini menuntut kecerdasan politik masyarakat dan kesiapan Partai Politik sebagai salah satu unsur utama dalam infrastruktur politik. Namun aktualisasi Partai Politik sebagai saluran utama aspirasi politik rakyat belum sepenuhnya berlangsung dengan optimal karena berbagai kondisi internal Partai Politik maupun perkembangan kondisi eksternal.

Kaderisasi Partai Politik yang belum berjalan dengan baik serta kecenderungan menimbulkan persepsi dan stigma masyarakat bahwa Partai Politik lebih mengutamakan kepentingan kelompok maupun elitnya dibandingkan dengan kepentingan masyarakat sehingga memunculkan sedikit kekecewaan masyarakat terhadap Partai Politik. Dalam konteks tersebut, diperlukan upaya dan dukungan dengan mendorong dan memfasilitasi Partai Politik untuk terus menerus meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan fungsinya melalui fasilitasi dan pemberian dukungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada sisi lain, kesadaran dan pemahaman politik masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan politik masyarakat. Keamanan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada), tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada, serta menurunnya sengketa hasil Pemilu dan Pilkada merupakan beberapa indikator yang menunjukkan tingkat politik masyarakat.

Aspek-aspek di atas sangat terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru. Oleh karena itu, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru sangatlah strategis khususnya dalam penanganan masalah-masalah yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban di masyarakat, serta menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan Berisi penjelasan singkat tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan umum (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja. Menyajikan secara ringkas perjanjian kinerja tahun 2024 dan indikator kinerja utama, Rencana kegiatan dan anggaran tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja yang dijabarkan melalui perbandingan realisasi dan target, Analisis peningkatan dan penurunan kinerja yang meliputi upaya yang telah dilakukan, hambatan dalam capaian kinerja, dan rencana tindak lanjut, analisis program/ kegiatan penunjang kinerja.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan strategi peningkatan kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan, dan di dalamnya ditetapkan indikator-indikator sasaran capaian kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan sesuai dengan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen untuk pencapaiannya.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan kinerja adalah sebagai unsur yang sangat menentukan, yaitu sebagai pedoman langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan.

2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sesuai dengan petunjuk Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 dengan berpedoman kepada tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut pada tabel-tabel diatas, kemudian langkah selanjutnya menjadi penetapan ke dalam **Perjanjian Kinerja** yang dilengkapi dengan Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang ingin dicapai sebagai dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan disertai dengan indikator kinerja. Diharapkan melalui perjanjian kinerja akan terwujud komitmen penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan demikian maka komponen perjanjian kinerja terdiri atas sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan anggaran yang tersedia.

Dengan berpedoman pada petunjuk-petunjuk sebagaimana diuraikan diatas, maka setelah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diawal tahun

2024, Kepala Badan sebagai Pejabat Tinggi Pratama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya telah menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 dengan Walikota Banjarbaru yang isinya terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis yang diselaraskan dengan tujuan dan sasaran **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru 2021-2026 yaitu untuk “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia”.**

2.1.1 Perjanjian Kerja Eselon II

Perjanjian Kerja Eselon II (Kepala Badan) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Potensi Paham Radikal yang Diselesaikan	100%
2	Meningkatnya Partisipasi Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik, Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Masyarakat	Persentase Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%
3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang Aktif	95%
4	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Fasilitasi / Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100%
5	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Potensi Konflik Ipolek Sosbud Hankam yang ditangani	100%

Sumber data diambil dari Bakesbangpol Kota Banjarbaru

2.2. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru telah menyusun program dan kegiatan

serta kebutuhan anggaran untuk setiap kegiatan. Program, kegiatan, dan anggaran tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru Tahun 2024. Adapun program, kegiatan, dan anggaran untuk setiap kegiatan pada sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, yang dijabarkan dalam 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp 35.000.000,-
 - b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.732.527.800,-
 - c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 219.375.000,-
 - d. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp.80.860.350,-
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - a. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 21.095.682.000 ,-
 - b. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-
 - c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.709.666.450,-
- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, yang dijabarkan dalam 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-
 - b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 55.000.000,-
- 4) Program Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu:
- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 633.596.300,-
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang dijabarkan dalam kegiatan yaitu:
- a. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-
 - b. Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 506.497.500,-
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 51.200.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja.

Capaian Kinerja tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru dapat diukur dari beberapa unsur yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu Penetapan Kinerja (TAPKIN), rencana kerja tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesbangpol Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru tahun 2021-2026. Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pada dasarnya diukur dari seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada outcome. Oleh karena itu, ketersediaan Rencana Strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai tolok ukur pengukuran serta penilaian kinerja Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru Tahun 2024.

Misi 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas berlandaskan nilai agama dan budaya

Sasaran strategis 5 : Meningkatnya toleransi beragama, kemananan, kenyamanan, kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat

Indikator kinerja 5.2 : Persentase pembinaan keagamaan, **penyelesaian potensi konflik SARA** dan pelanggaran PERDA

Sasaran Meningkatnya toleransi beragama, kemananan, kenyamanan, kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat dengan Indikator kinerja penyelesaian potensi konflik SARA dipilih untuk mengetahui sejauh mana pemantauan potensi sosial yang dilaksanakan sehingga memudahkan penanganan dan penyelesaian konflik sosial yang harus segera diselesaikan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Utama dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Banjarbaru Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Sasaran Strategis I : Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
	Persentase Potensi Paham Radikal yang Diselesaikan	%	100%	100%	100%
2	Sasaran strategis II : Meningkatnya Partisipasi Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik, Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Masyarakat				
	Persentase Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	%	100%	100%	100%
3	Sasaran strategis III : Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
	Persentase Ormas yang Aktif	%	95%	96%	101%
4	Sasaran strategis IV : Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya				
	Fasilitasi / Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	100%	100%	100%
5	Sasaran strategis V : Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial				
	Persentase Potensi Konflik Ipolek Sosbud Hankam yang ditangani	%	100%	100%	100%

Sumber data diambil dari Bakesbangpol Kota Banjarbaru

Adapun Capaian kinerja Eselon II (Kepala badan) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sasaran dan indikator pada strategis I dipilih untuk mengetahui sejauh mana penguatan dan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan di Kota Banjarbaru karena dengan semakin meningkatnya pemahaman, kesadaran dan pengamalan pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme tersebut, maka semakin baik kehidupan bertoleransi dimasyarakat dalam rangka mengetahui dan mengantisipasi pertumbuhan kelompok radikal.

Rumus yang digunakan untuk mengukur dengan indikator potensi paham radikal yang diselesaikan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah potensi konflik paham radikal yang diselesaikan}}{\text{Jumlah potensi}} \times 100\%$$

Capaian kinerja meningkatnya penguatan dan pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan indikator Persentase Potensi Paham Radikal yang Diselesaikan adalah :

$$\frac{1}{1} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Tabel .2.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase potensi paham radikal yang diselesaikan	%	100%	100%	100%

Sumber data diambil dari Bakesbangpol Kota Banjarbaru

Berdasarkan sumber data dari laporan bidang Ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa kota Banjarbaru bahwa Pada tahun 2024 ada peristiwa atau kejadian yang berpotensi ke arah konflik SARA . yaitu :

Penolakan Warga Komplek Griya Asri Abadi terhadap kegiatan LDII di Lingkungan RT 29 RW 07 Kelurahan Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru

Dari peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang berpotensi ke arah **konflik SARA** namun segera ditangani sehingga sepanjang tahun 2024 tidak sampai menjadi konflik radikal di kota Banjarbaru.

2. **Sasaran strategis II : Meningkatnya partisipasi peran partai politik dalam pendidikan politik, pengembangan etika serta budaya politik masyarakat**
Indikator : Persentase peran partai politik dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

Sasaran dan indikator sasaran strategis II dipilih untuk mengukur tingkat partisipasi peran partai politik dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik karena salah satu fungsi partai politik dalam legislasi adalah sebagai sarana pendidikan dan sosialisasi politik dimana Partai politik agar dapat mensosialisasikan wacana politiknya kepada publik.

Beranjak dari definisi tersebut diatas maka formulasi/ rumus persentase peran partai politik dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik adalah

$$\frac{\text{Jumlah pendidikan politik yang dilaksanakan parpol}}{\text{Jumlah partai politik}} \times 100\%$$

Persentase peran serta partai politik dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik bisa dilihat pada rumus diatas. Semakin tingginya tingkat pelaksanaan pendidikan politik masyarakat, semakin baik tingkat partisipasi masyarakat dalam berpolitik.

Dari 18 Partai politik yang ada di Kota Banjarbaru ada sebanyak 9 partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Banjarbaru. 9 partai inilah yang mendapatkan bantuan hibah dan pada tahun 2024 **semuanya telah** melaksanakan pendidikan politik. Pendidikan politik ini dilaksanakan berupa kegiatan sosialisasi, pelatihan, bimtek dan sarasehan untuk kader politik masing-masing.

$$\frac{9}{9} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Berdasarkan data tersebut capaian persentase peran partai politik dalam pendidikan politik untuk tahun 2024 telah mencapai target yakni **100% (Baik)**.

Tabel .2.4
Capaian Kinerja sasaran strategis II

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peran partai politik dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	%	100%	100%	100%

Sumber data diambil dari Bakesbangpol Kota Banjarbaru

3. Sasaran strategis III : Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

Indikator : Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan harus menjadi mitra pemerintah untuk memfasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka dari itu supaya tiga hal tersebut dapat tercapai maka organisasi masyarakat harus dibina supaya lebih aktif dalam membantu program-program pemerintah dengan kata lain menjadi mitra pemerintah.

Mengacu pada definisi tersebut diatas, yakni berpartisipasi dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan maka organisasi kemasyarakatan perlu sekali untuk diberdayakan dalam pengertian sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kelangsungan ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel dan proporsional.

Sasaran dan indikator ini dipilih bertujuan untuk mengukur tingkat keaktifan organisasi kemasyarakatan dalam ketahanan, ekonomi, sosial, budaya dan agama, maka formulasi/ penjelasan dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah ormas yang aktif}}{\text{Jumlah ormas}} \times 100\%$$

Untuk target indikator kinerja Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif untuk mengukur pencapaian sasaran strategis III pada tahun 2024 adalah 90%. Berdasarkan data Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan Kantor kesatuan Bangsa dan politik Kota Banjarbaru jumlah ormas yang ada di Banjarbaru adalah sebanyak 53 dan yang aktif sebanyak 51 (Data terlampir). Berdasarkan data diatas dapat kita hitung pencapaian target untuk sasaran strategis III yaitu :

$$\frac{51}{53} \times 100\% = 96\%$$

Target capaian indikator untuk sasaran strategis III pada tahun 2024 adalah 95%, sedangkan realisasi sebesar 96 %. Hal ini bisa diartikan bahwa capaian sasaran strategis III telah mencapai target sebesar **101% (Baik Sekali)**.

Tabel 2.5
Capaian Kinerja sasaran strategis III

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase ormas yang aktif	%	95%	96%	101 %

Sumber data diambil dari Bakesbangpol Kota Banjarbaru

4. Sasaran strategis IV : Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

Indikator : Persentase fasilitasi/ pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

Tingkat pencapaian sasaran strategis IV dapat diukur melalui persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya pada tahun 2024. Dengan memfasilitasi kegiatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ada maka diharapkan membuat meningkatnya ketahanan ekonomi sosial dan budaya di Kota Banjarbaru sebagai pendorong dan pendukung pertumbuhan dan stabilitas kehidupan ekonomi masyarakat yang sehat dan dinamis. Berdasarkan hal tersebut maka formulasi/ penjelasan dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang tertangani}}{\text{Jumlah fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani}} \times 100\%$$

Persentase fasilitasi/ pembinaan ketahanan ekonomi sosial budaya yang dilaksanakan bisa dilihat pada rumus diatas. Semakin tingginya fasilitasi/ pembinaan ketahanan ekonomi sosial budaya yang tertangani maka semakin meningkat ketahanan ekonomi sosial budaya di kota Banjarbaru.

Ada 10 fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani oleh Bidang Ketahanan Seni, budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru pada tahun 2024 yang terbagi atas: 7 kegiatan koordinasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan 3 kegiatan koordinasi P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).

$$\frac{10}{10} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Dari 10 jumlah fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya yang ditangani tersebut **semuanya tertangani dengan baik** sehingga dari persentase diatas capaian persentase sasaran strategis IV untuk tahun 2024 telah tercapai sesuai target yakni **100 % (Baik)**.

10 fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya yang ditangani tersebut yaitu :

7 kegiatan FKUB (Froum Kerukunan Umat Beragama) yaitu :

- Sosialisasi FKUB
- Sosialisasi Moderasi Beragama
- Rapat FKUB
- Rapat Kasus situasional FKUB
- Sosialisasi dan dialog tokoh agama
- Dialog tokoh agama dan pimpinan pesantren
- Monev

3 Kegiatan P4GN (pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika)

- Sosialisasi Kelurahan bersinar dan P4GN
- Fasilitasi Pencegahan Penyalahkan gunaan narkotika (tes urine) ASN
- Kegiatan TIM PIC (Personal In Crime)
-

Tabel 2.6
Capaian Kinerja sasaran strategis IV

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
-------------------	--------	--------	-----------	---------

Persentase fasilitasi/ pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	100%	100%	100%
---	---	------	------	------

Sumber data diambil dari Bakesbangpol Kota Banjarbaru

5. Sasaran strategis V : Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
Indikator : Persentase potensi konflik ipoleksosbud Hankam yang ditangani

Berdasarkan data dari Bidang Kewaspadaan nasional dan penanganan konflik Pada tahun 2024 ada beberapa kejadian atau peristiwa yang secara umum berpotensi ke arah konflik yang terjadi yaitu :

1. Maraknya Peternakan Babi tak berijin yang berlokasi di Guntung Manggis dan Batu Besi yang berada dekat dengan pemukiman warga sehingga meresahkan warga
2. Relokasi Warga Sekitar Sungai Kuranji Kecamatan Cempaka
3. Relokasi Peternakan Babi di Jalan Pandarapan RT 03 RW 005 Kelurahan Guntung Manggis
4. Sengketa Lahan Warga dan Lahan Transmigrasi Kec. Cempaka dengan TNI

Tingkat pencapaian sasaran strategis V di atas diukur dengan indikator kinerja persentase potensi konflik Ipolek sosbud Hankam yang ditangani. Dengan meningkatnya pemantauan potensi sosial, maka memudahkan penanganan dan penyelesaian konflik sosial yang harus segera diselesaikan.

Berdasarkan alasan diatas dibuat formulasi rumus yang digunakan untuk mengukur indikator yang ada yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud Hankam yang tertangani}}{\text{Jumlah potensi}} \times 100\%$$

$$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Dari pemantauan 4 potensi konflik yang ada di tahun 2024 tersebut semuanya telah tertangani (100%) sehingga untuk capaian potensi konflik Ipolek sosbud Hankam untuk tahun 2024 adalah 100 % (Baik), dengan rincian 4 potensi

konflik telah terselesaikan dan 3 potensi konflik telah tertangani namun masih terus dalam proses penyelesaian (Data Terlampir)

Tabel 2.7
Capaian Kinerja sasaran strategis V

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase potensi konflik Ipolek sosbud Hankam yang tertangani	%	100%	100%	100%

Sumber data diambil dari Bakesbangpol Kota Banjarbaru

b. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022, 2023 dan 2024

Indikator Sasaran	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Persentase potensi paham radikal yang diselesaikan	100%	100%	100%
Persentase peran partai politik dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%	100%	100%
Persentase ormas yang aktif	92%	100%	96%
Persentase fasilitasi/ pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	100%	100%
Persentase potensi konflik Ipolek sosbud Hankam yang tertangani	100%	100%	100%

Sumber data diambil dari Bakesbangpol Kota Banjarbaru

Realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022 terdapat penurunan capaian indikator sasaran kinerja sasaran persentase ormas yang aktif yang semula 92% (Tahun 2022) naik menjadi 100% (Tahun 2023) dan 96% (Tahun 2024)

c. Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra Tahun Akhir)

Perbandingan Realisasi/ Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra Tahun Akhir) bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Renstra Tahun Akhir

Indikator Sasaran	Tahun 2024	Renstra Tahun akhir
	Realisasi/ capaian	Realisasi/ capaian
Persentase potensi paham radikal yang diselesaikan	100%	100%
Persentase peran partai politik dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%	100%
Persentase ormas yang aktif	96%	100%
Persentase fasilitasi/ pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	100%
Persentase potensi konflik Ipolek sosbud Hankam yang tertangani	100%	100%

Sumber data diambil dari Bakesbangpol Kota Banjarbaru

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator Sasaran	Tahun 2024	Standar Nasional
	Realisasi	Realisasi
Persentase potensi paham radikal yang diselesaikan	100%	-
Persentase peran partai politik dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%	-
Persentase ormas yang aktif	100%	-
Persentase fasilitasi/ pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	-
Persentase potensi konflik Ipolek sosbud Hankam yang tertangani	100%	-

Sumber data diambil dari Bakesbangpol Kota Banjarbaru

Formulasi Perhitungan standar nasional untuk indikator sasaran strategis yang ada menggunakan rumus yang berbeda sehingga untuk perbandingan dengan standar nasional belum bisa dilakukan.

e. Perbandingan realisasi kinerja dengan Kabupaten/kota/Provinsi

Capaian Indikator sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik jika dibandingkan dengan kabupaten/ Kota/ Propinsi terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/ Provinsi

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Kota Banjarmasin	Provinsi Kalsel
Persentase potensi paham radikal yang diselesaikan	100%	-	-
Persentase peran partai politik dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%	-	-
Persentase ormas yang aktif	96%	-	-
Persentase fasilitasi/ pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	-	-

Sumber data diambil dari Bakesbangpol Kota Banjarbaru

Untuk perbandingan capaian indikator sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan kabupaten/ Kota/ Propinsi pada tahun 2024 belum dapat dilakukan karena untuk rumus perhitungan indikator kinerjanya berbeda sehingga perbandingan realisasi dan capaian kinerja tersebut tidak dapat dilakukan.

3.2. ANALISIS PENURUNAN DAN PENINGKATAN KINERJA

Secara umum capaian kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru pada Tahun 2024 mencapai 100%. Ada 1 indikator kinerja yang mengalami penurunan yaitu persentase ormas yang aktif yang pada tahun 2023 sebesar 100% dan pada tahun 2024 menjadi 96%.

Ada beberapa upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan rapat internal dalam upaya deteksi dini, cegah dini dan antisipasi dini dalam masyarakat sebagai upaya pencegahan dan peningkatan penyelesaian paham radikal yang ada di Kota Banjarbaru.
2. Mengupayakan peningkatan peran partai politik dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik melalui sosialisasi pendidikan politik dan monitoring terhadap perkembangan politik di kota banjarbaru
3. Melaksanakan upaya peningkatan persentase ormas yang aktif melalui sosialisasi keormasan dan pendataan ormas sekaligus pembinaan kepada pengurus ormas.

4. Melaksanakan upaya peningkatan Persentase fasilitasi/ pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya melalui sosialisasi kepada masyarakat terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba dan fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB
5. Melaksanakan upaya peningkatan potensi konflik Ipolek sosbud Hankam yang tertangani melalui pembentukan Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) dan pembinaannya.

- Hambatan pencapaian kinerja

Pada tahun 2024 terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi Kepala Badan dalam upaya pencapaian sasaran Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi :

1. Banyaknya berita hoax menjelang pelaksanaan pilkada di tahun 2024 yang menyebabkan terjadinya gesekan, persaingan antar pendukung di masyarakat.
2. Sumberdaya yang terbatas dihadapkan pada dinamika sosial dan politik yang demikian cepat.

- Rencana Tindak Lanjut

1. Mengintensifkan rapat internal di lingkungan SKPD untuk mengevaluasi capaian kinerja masing-masing aparatur serta mengantisipasi kendala atau gangguan yang dapat menghambat pencapaian kinerja masing-masing aparatur.
2. Akan dilaksanakan pemantauan rencana aksi secara bulanan dan penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan alternatif yang dilakukan.


3.3. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan. Efisiensi atas penggunaan anggaran

tersebut adalah sebesar 4.32% atau Rp.1.455.472.897,-. Program dan kegiatan dapat terlaksana dengan serapan anggaran Rp. Rp.32.204.656.183,- atau 95,68% dari pagu anggaran sebesar Rp. 33.660.129.080,-.

Realisasi tingkat capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran 2024

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA BANJARBARU LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023</p>					
Organisasi : 1-05.8-01.0-00.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik					
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
5	BELANJA DAERAH	33.660.129.080,00	32.204.656.183,00	95,68	23.443.482.654,00
5.1	BELANJA OPERASI	32.945.569.080,00	31.508.569.183,00	95,64	22.617.444.954,00
5.1.1	Belanja Pegawai	4.908.441.530,00	4.717.604.757,00	96,11	3.422.149.778,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.251.138.050,00	4.089.183.962,00	77,87	3.771.638.854,00
5.1.5	Belanja Hibah	22.683.589.500,00	22.683.580.464,00	100,00	15.405.056.322,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	102.400.000,00	18.200.000,00	17,77	18.600.000,00
5.2	BELANJA MODAL	714.560.000,00	696.087.000,00	97,41	826.037.700,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	538.645.000,00	530.829.000,00	98,55	628.820.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.915.000,00	163.508.000,00	99,75	197.217.700,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.000.000,00	1.750.000,00	14,58	0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		(33.660.129.080,00)	(32.204.656.183,00)	100,00	(23.443.482.654,00)

3.3. REALISASI ANGGARAN SESUAI DENGAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

Tabel 3.13
Realisasi anggaran sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran 2024

Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 7.295.723.830,00	Rp 6.949.629.669,00	95,26%
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp 2.067.763.000,00	Rp 1.373.010.900,00	66,40%

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp 22.880.348.450,00	Rp 22.859.667.914,00	99,91%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp 115.000.000,-	Rp 103.194.000,00	89,73 %
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp 713.596.300,00	Rp 623.737.750,00	87,41 %
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	587.697.500,00,-	Rp 295.415.950,00	50,27%

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil akuntabilitas kinerja pada Bab III menunjukkan tingkat pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru pada tahun 2024 dijabarkan ada 5 sasaran strategis untuk eselon II, yang diukur melalui pencapaian target indikator kinerja menunjukkan keberhasilan capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat direalisasikan dalam rangka pencapaian target-target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Banjarbaru pada tahun 2024.

Secara ringkas pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :

- Indikator Kinerja Sasaran Persentase Potensi Paham Radikal yang Diselesaikan, dengan hasil pencapaian kinerjanya dengan adalah **100 % (Baik)**.
- Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, pencapaian kinerjanya adalah **100% (Baik)** yang berarti tingkat partisipasi masyarakat dalam berpolitik yang cukup baik.
- Indikator Kinerja persentase ormas yang aktif pencapaian kinerjanya adalah **101% (Sangat Baik)** yang berarti tercapainya sasaran strategis yang ada yaitu meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
- Indikator kinerja persentase fasilitasi/ pembinaan ketahanan ekonomi, social dan budaya pencapaian kinerjanya adalah **100% (Baik)**. Dengan tercapainya target fasilitasi ketahanan ekonomi social dan budaya ini maka berarti turut meningkatnya ketahanan ekonomi, social dan budaya di Kota Banjarbaru.
- Indikator kinerja persentase potensi konflik ipoleksosbud hankam yang ditangani pencapaian kinerjanya adalah **100% (Baik)** karena semua potensi konflik yang ada telah tertangani.

Untuk capaian dari aspek pembiayaan/ penggunaan anggaran tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru adalah **95,68 %** dengan serapan anggaran Rp. 33.660.129.080,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 32.204.656.183,-.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dengan tetap berpedoman kepada sasaran indikator capaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, maka dengan mengevaluasi, mencermati serta memperhatikan dari berbagai permasalahan yang menjadi kendala-kendala sehingga berdampak belum maksimalnya pencapaian target kinerja sebagaimana disimpulkan diatas, guna meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan/ program yang akan datang, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan ataupun pembenahan antara lain :

1. Diperlukan adanya penguatan pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian, sehingga benar-benar merupakan suatu rangkaian proses yang menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan dalam menentukan tingkat keberhasilan Pencapaian Kinerja
2. Memberdayakan segala potensi yang ada dan/ atau yang dimiliki dengan memprioritaskan membangun komitmen dan dedikasi serta integritas yang tinggi dari semua sumber daya aparatur yang jumlah dan kualitas saat sekarang ini masih kurang memadai untuk peningkatan produktifitas kinerjanya.
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dengan semua instansi/ SKPD terkait, forum-forum, partai politik dan organisasi kemasyarakata, tokoh-tokoh masyarakat dan agama, serta elemen-elemen kemasyarakata lainnya karena tingkat keberhasilan pencapaian kinerja hampir disemua kegiatan/ program sangat/ atau selalu tergantung dari sinergitas dan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait instansi diluar (eksternal) organisasi.
4. Melaksanakan penataan dan konsolidasi terhadap unsur penentu utama terhadap efektifitas dan efiesiensi pelaksanaan kegiatan/program, yaitu penataan dan pembaharuan serta penguatan pada basis data dan informasi potensi rawan konflik, ormas/LSM, rawan partisipasi politik dan data/ informasi lainnya yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi dan sasaran-sasaran

strategis dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai petunjuk ataupun pedoman pelaksanaan program dan kegiatan

Dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode tahun 2021-2026. Target capaian indikator keberhasilan setiap sasaran telah didesain untuk meningkat setiap tahunnya. Memperhatikan target sasaran tersebut dan mempertimbangkan dinamika dan perkembangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru, maka perlu direncanakan dan dirumuskan kegiatan-kegiatan yang inovatif dan efektif yang mengarah kepada pencapaian target dan sasaran. Selain itu, kegiatan antar bidang seharusnya bersinergi dan saling mendukung, sehingga pencapaian target dan sasaran akan lebih optimal.

Demikian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru tahun 2024 ini disusun, untuk menjadi bahan penilaian dan masukan dalam pelaksanaan tugas di masa mendatang.

Banjarbaru, Februari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Banjarbaru,



H.RIZANA MIRZA, SH, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19660828 199303 1 007

Lampiran

KEGIATAN MONITORING ORMAS



KEGIATAN KEGIATAN MODERASI BERAGAMA



KEGIATAN KEMAH PEMUDA LINTAS AGAMA



KEGIATAN PENDIDIKAN POLITIK



KEGIATAN KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANAN KONFLIK



KEGIATAN IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN





PEMERINTAH KOTA BANJARBARU INSPEKTORAT

Alamat : Jl.Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lt. 2 Banjarbaru 70713

Website : <http://inspektorat.banjarbarukota.go.id> / E-mail: inspektorat@banjarbarukota.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru** untuk Tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru**.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Banjarbaru, 27 Februari 2025

Inspektur Kota Banjarbaru,



Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si, CGCAE

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197006151990031006